

LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DI MAKASSAR (SHARIA-BASED MICROFINANCE INSTITUTIONS AND THE EMPOWERMENT OF SOCIETY ECONOMY IN MAKASSAR)

Salmah Said

ABSTRACT

The existence of sharia-based microfinance institutions plays an important role in developing small and micro business in Makassar. Most of these small and micro enterprises are having lack of access to banking industry for financing and developing their business. The main factor is that small and micro business cannot accomplish the requirements to acquire financing from banks. Generally, the legal status of these microfinance institutions is sharia-based cooperative, which is known as Baitul Maal wat Tamwil (BMT). The number of actively operating BMTs are 17 and under coordination of Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) of South Sulawesi.

BMT in Indonesia, as a sharia-based microfinance institutions, is significantly developed. There are about 128 BMTs operate and provide financial aids for small and micro business in South Sulawesi. According to PINBUK data, there are around 3.200 BMTs operated nationally in 2006. These numbers increase and reach 3.900 BMTs aktively operate in the end of 2010.

In 2006, BMTs had total assets of Rp. 2.000.000.000.000,- with around 3 millions of people who gained benefits from fund provided by BMTs. Total assets have almost three-fold, which is Rp. 5.000.000.000.000,- at the end of 2010, with customers around 3,5 millions people, around 60.000 people work at BMTs.

To overcome the limit access problem faced by small and micro business, the government launched program of BMT to support alleviation poverty program by fulfilling wider accessibility of small micro business to financial intitutions to support their business. Small and micro business are, generally, operate in home industries, farmers, animal farmers, service industries, etc. These industries have lack of management skills, capitals,

modern machines, which in turn, they can not compete with big companies, which have large amount of funds.

This research is a survey research and analysis method used is a multiple regression analysis, utilizing t-test and F-test to examine both the effects of independent variables, both partially and simultaneously to dependent variable. Independent variables tested are the scheme of financing repayment (X_1), amount of financing (X_2), easiness of financing requirements (X_3), the management of small and micro business (X_4), and the control of BMT of small and micro business (X_5). The dependent variable is the role of BMT (sharia-based micro finance) of the development of small and micro business (Y).

Specifically, using t-test, the independent variables of (X_1), (X_2), and (X_3), partially have significant effects on the role of BMT (sharia-based micro finance) of the development of small and micro business (Y). While independent variables of (X_4), (X_5), partially have no significant effects on the role of BMT (sharia-based micro finance) of the development of small and micro business (Y). The result of F-test shows that all independent variables are simultaneously have significant effects on dependent variable. In conclusion, the research shows that these sharia-based microfinance institutions have a significant role in providing small scale financing scheme to develop small and micro business in Makassar, which banking industries ignore to provide.

To further boost the BMTs' services, this research recognizes that managerial training is urgently needed to improve their service quality to their customers, i.e. small and micro enterprises. The research also shows the prospect of Islamic economy, specifically Islamic finance, to expand in the future, in terms of total assets, number of business served by BMTs, and number of BMTs operate around the country

I. Pendahuluan

Indonesia mengalami keterpurukan ekonomi pada tahun 1997 – 2000an akibat krisis ekonomi dan krisis keuangan global yang bermula di negara lain. Sektor perbankan mengalami kesulitan likuiditas akibat banyaknya nasabah menarik dananya secara bersamaan, sedangkan kreditur mengalami kesulitan untuk mengembalikan pinjamannya kepada perbankan. Hal ini juga memengaruhi dunia usaha untuk maju dan berkembang. Banyak perusahaan-perusahaan besar yang mengalami kesulitan operasional akibat tingginya harga bahan baku industri, kesulitan keuangan dan tidak dapat mengembalikan pinjaman karena tingginya suku bunga kredit, serta berbagai

permasalahan lainnya. Ketika krisis terjadi pada tahun 1997, usaha kecil mikro (UKM) dapat bertahan di tengah krisis karena operasional usaha ini tidak terlalu dipengaruhi oleh kondisi negatif yang terjadi di sektor moneter. Di satu sisi, kurangnya dukungan sektor moneter terhadap UKM justru berdampak positif pada saat itu. Namun, di sisi lain, secara umum aksesibilitas yang rendah pada lembaga keuangan terbukti sebagai faktor kurang berkembangnya usaha kecil mikro menengah (UMKM) di beberapa negara.

Secara historis, usaha kecil mikro di Indonesia telah menjadi pelaku utama dalam kegiatan ekonomi domestik, terutama sebagai penyedia lapangan kerja terbesar. Dengan demikian, usaha kecil mikro ini menjadi sumber utama pendapatan bagi banyak rumah tangga di Indonesia. Bagi rumah tangga petani miskin yang berpendapatan rendah di pedesaan, usaha kecil mikro di bidang non-pertanian menjadi alternatif sumber pendapatan.⁴⁹¹ Bahkan usaha kecil mikro ini telah menjadi pelopor pertumbuhan ekonomi tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di beberapa negara berkembang lainnya.

UKM berperan serta mengentaskan kemiskinan meski dengan skala usaha dan pangsa pasar yang relatif terbatas. Usaha kecil menengah di Ghana, Bostwana, dan Uganda memberikan kontribusi signifikan bagi pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan dan penurunan tingkat pengangguran, karena bersifat padat karya (*labor intensive*).⁴⁹² Di Taiwan, sebesar 97,8 persen dari total usaha yang ada adalah usaha kecil menengah.⁴⁹³ Penelitian Tambunan membuktikan peran UMKM di Indonesia, Singapore, Malaysia, Myanmar, Thailand, Philipina, Viet Nam, Kamboja, Brunei Darussalam, cukup signifikan dalam perekonomian di masing-masing negara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat sekitar 97 – 99 persen UMKM dari total bisnis di negara-negara ASEAN tersebut dan mampu menyerap tenaga kerja antara 45

⁴⁹¹ Tulus Tambunan, "SME Development in Indonesia: Do Economic Growth and Government Support Matter?" *Social Science Research Network* _ SSRN-id1218922, (2007), 3.

¹⁴⁹² Constant Okello-Obura, M.K. Minishi-Majanja and Linda Cloete., J.R. Ikoja-Odongo., "Business Activities and Information Needs of SMEs in Northern Uganda: Prerequisites for an Information System", *Business Activities of SMEs*, Vol. 29 No. 4/5, (2008), 367-391; Temtime, Zelealem T., Chinyoka., S.V., and J.P.W., "A Decision Tree Approach For Integrating Small Business Assistance Schemes", *Journal of Management Development*, Vol. 23 No. 6, (2004), 563-578; Abor, Joshua., Biekpe, Nicholas, "Corporate Governance, Ownership Structure, and Performance of SMEs in Ghana: Implications for Financing Opportunities", *Journal of Corporate Governance*, Vol. 7 No. 3, (2007), 288 – 300.

⁴⁹³ Carol Yeh-Yun Lin and Mavis Yi-Ching Chen., "Does Innovation Lead to Performance? An Empirical Study of SMEs in Taiwan", *Management Research News*. Vol. 30 No. 2, (2007), 115-132.

– 99,6 persen dari total tenaga kerja.⁴⁹⁴ Penelitian Obaidullah membuktikan peran UMKM ini juga terjadi di Bangladesh dan Turki.⁴⁹⁵

Namun permasalahan yang dihadapi oleh usaha kecil mikro di negara-negara tersebut hampir sama: rendahnya aksesibilitas terhadap pembiayaan dari perbankan adalah kendala utama kurang berkembangnya sektor usaha ini.⁴⁹⁶ Hal ini disebabkan oleh persyaratan 5C dalam pemberian pembiayaan usaha/kredit oleh bank: *Collateral* (jaminan), *Capacity* (kapasitas usaha), *Character* (karakter peminjam), *Capital* (modal usaha), *Condition of economy* (kondisi perekonomian secara makro). Diantara kelima persyaratan tersebut, unsur *Collateral* (jaminan) merupakan faktor yang paling sulit dipenuhi oleh usaha kecil mikro dan menengah.⁴⁹⁷

Hasil penelitian Tambunan juga memperlihatkan bahwa UMKM di Indonesia memiliki ragam usaha yang luas, terutama terkonsentrasi pada sektor pertanian, hotel dan restoran. Selain itu, terdapat pula industri manufaktur sederhana seperti produksi kayu, *furniture*, tekstil, sepatu, makanan dan minuman. Sejumlah kecil UMKM ini bergerak di bidang produksi mesin dan komponen suku cadang kendaraan, yang umumnya dijalankan melalui subkontrak dengan perusahaan mobil multinasional seperti Toyota dan Honda. Hal ini menggambarkan pula kondisi UMKM di Indonesia yang belum memiliki kemampuan teknologi yang maju seperti UMKM di Korea Selatan, Jepang, dan Taiwan.

Dari sisi output yang dihasilkan, UMKM memperlihatkan kinerja yang menggembirakan, dimana usaha kecil dan mikro berturut-turut berkembang sekitar 3,96 persen dan 4,59 persen pada tahun 2001 dan menjadi sekitar 5,38 persen dan 5,44 persen di tahun 2006. Pada periode yang sama usaha besar hanya berkembang sekitar 3,04 persen dan 5,60 persen. Bahkan, kontribusi UKM dalam produk domestik bruto (PDB) Indonesia lebih tinggi daripada usaha besar, yaitu lebih dari 50 persen dari proporsi PDB untuk periode yang sama.⁴⁹⁸ Secara rata-rata, kontribusi output UKM

⁴⁹⁴ Tulus Rambunan, “Recent Development of Women’s Enterprises in Indonesia, Kadin – Indonesia”, (2007), h. 5, http://www.kadin-indonesia.or.id/enm/images/dokumen/KADIN-98-2309-21112007-rec-dev-women-enterprise_TULUS, (diakses 26 Februari 2010).

⁴⁹⁵ Mohammed Obaidullah, “Role of Microfinance in Poverty Alleviation: Lessons from Experiences Selected IDB Member Countries”, *Islamic Research and Training Institute*, Member of Islamic Development Bank Group, (2008), h. 1 – 92.

⁴⁹⁶ Asyraf Wajdi Dusuki, “Banking for the Poor: the Role of Islamic Banking in Microfinance Initiatives”, *Humanomics*, Vol. 24 No. 1, (2008), pp. 50-51. Lihat pula Tambunan, “Recent Development”..., *op.cit.*, h. 4; Tambunan, “SME Development”, *ibid*, h. 3; lihat Okello-Obura, Constant., M.K. Minishi-Majanja and Linda Cloete., J.R. Ikoja-Odongo, *op.cit.*, h. 369; lihat pula Temtime, Zelealem T., Chinyoka., S.V., and J.P., *op.cit.*, 563; lihat pula Abor, Joshua., Biekpe, Nicholas, *op.cit.*, h. 289; lihat pula Carol Yeh-Yun Lin and Mavis Yi-Ching Chen, *op.cit.*, h. 115; dan lihat pula Berry, Albert., Levy, Brian., “Indonesia’s Small and Medium-Size Exporters and Their Support Systems”, Policy Research Working Paper 1402, the World Bank, *Policy Research Development*, Finance and Private Sector Development Division, (1994), h. 3 – 74.

⁴⁹⁷ Dusuki, *op.cit.*, h. 50.

⁴⁹⁸ Data BPS dalam Tambunan, *ibid.*, h. 3.

terhadap tingkat pertumbuhan PDB adalah di atas dua persen, sedangkan usaha besar di bawah angka dua persen.

Untuk mengatasi keterbatasan akses pembiayaan usaha kecil mikro ini, maka pemerintah Indonesia telah mencanangkan pengembangan dan pemanfaatan BMT (*Baitul Maal wa Tamwil* sejak 7 Desember 1995) sebagai gerakan.⁴⁹⁹ Gerakan nasional ini bertujuan untuk menjembatani kesenjangan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan menggali potensi ekonomi di kalangan umat Islam. Tahun 2006, sebanyak 3.200 BMT telah tersebar di seluruh provinsi di Indonesia, dengan sekitar tiga juta orang telah mendapatkan layanan dari BMT. Sebagian besarnya adalah masyarakat yang bergerak di bidang usaha kecil mikro atau usaha sangat kecil. Lingkup bidang usaha dan profesi yang didanai oleh BMT sangat luas, mulai dari pedagang sayur, penarik becak, pedagang asongan, pedagang kelontongan, penjahit rumahan, pengrajin kecil, tukang batu, petani, peternak, sampai dengan kontraktor dan usaha jasa yang relatif modern.⁵⁰⁰

Saat ini, terdapat 128 BMT di Sulawesi Selatan dan sebanyak 17 BMT beroperasi di kota Makassar yang berada di bawah koordinasi PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) Sulawesi Selatan.⁵⁰¹ Jenis usaha yang memperoleh bantuan pembiayaan BMT di kota Makassar meliputi jasa (salon, tukang becak, usaha tambal ban, tukang jahit); perdagangan (penjual sayur, penjual ikan, penjual buah, penjual pakaian jadi), serta *home industry* (asesoris dan souvenir, pembuatan keripik singkong, dan lain-lain).

Di kota Makassar sendiri, begitu banyak usaha kecil mikro yang berkembang dan membutuhkan dukungan pembiayaan dari lembaga keuangan seperti perbankan, koperasi dan institusi keuangan lainnya. Dari data PINBUK Sulawesi Selatan, tercatat sekitar kurang lebih 20.000 orang yang menjalankan usaha di sektor informal yang termasuk dalam kategori usaha kecil mikro. Selain kendala pendanaan, birokrasi perizinan menjadi masalah lain dalam pengembangan usaha ini.

Peran serta BMT dalam mengembangkan usaha mikro kecil ini patut diperhitungkan dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat kota Makassar. Tahun 2010-2011⁵⁰² aset BMT secara total adalah sebesar Rp. 22.478.621.352; dengan total modal Rp. 5.512.923.061. Jumlah dana yang sekarang beredar dan dimanfaatkan usaha kecil mikro sebesar Rp. 15.774.550.310 dengan jumlah anggota di seluruh BMT di kota Makassar sebanyak 22.028 orang. Dana yang dapat dihimpun oleh BMT sampai saat ini sebesar Rp. 9.087.253.807 dan telah membagikan sisa hasil usaha (SHU) sebesar Rp. 708.193.876.

⁴⁹⁹ Obaidullah, *op.cit*, h. 49.

⁵⁰⁰ Awalil Rizki, *Optimalisasi Keunggulan BMT bagi Pengembangan Ekonomi Rakyat*, 12 April 2009, <http://pemodalansbm.com/> (14 Februari 2010).

⁵⁰¹ Data dari PINBUK Sulawesi Selatan.

502 Data PINBUK Sulawesi Selatan, *ibid.*

Data tersebut di atas menggambarkan potensi pertumbuhan ekonomi yang berasal dari masyarakat kalangan menengah ke bawah dalam bentuk usaha kecil mikro. Pengembangan usaha tersebut menjadi usaha yang lebih besar dan dapat menopang perekonomian negara membutuhkan perhatian dan bantuan dari berbagai pihak seperti pemerintah, swasta, dan terutama lembaga keuangan. Institusi sektor moneter ini termasuk perbankan, BPR-BPRS, koperasi dan lembaga keuangan mikro syari'ah, seperti BMT, diharapkan memberikan kontribusi berarti dalam mendukung pengembangan usaha kecil mikro ini.

II. Tinjauan Teoritis

Terdapat perbedaan pengertian antara usaha kecil dan usaha mikro, yang seringkali dipertukarkan pengertiannya. Menurut UU No. 9 Tahun 1995, usaha kecil adalah usaha dengan kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000.⁵⁰³ Menteri Negara Koperasi dan UKM menggunakan Undang-Undang ini untuk mengklasifikasikan jenis-jenis usaha dan mengelompokkan usaha mikro dalam pengertian ini. Sedangkan definisi usaha kecil dan usaha mikro menurut Departemen Keuangan dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 40/KMK.0.6/2003 menekankan pada besarnya hasil/pendapatan usaha tersebut. Jadi, usaha mikro adalah usaha yang produktif milik keluarga atau perorangan warga negara Indonesia dan memiliki hasil penjualan paling besar Rp. 100.000.000, pertahun.

Selain itu, terdapat pula perbedaan pengertian dari Biro Pusat Statistik (BPS). BPS mendasarkan definisi usaha kecil dan mikro pada batasan jumlah tenaga kerja dalam menentukan jenis usaha, terutama pada sektor industri, yaitu Industri Kerajinan Rumah Tangga (IKRT) dengan 1-4 pekerja, industri kecil (IK) memiliki 5-19 pekerja termasuk pemilik usaha. Batasan ini digunakan pula oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan dalam mendefinisikan usaha kecil dan mikro, yaitu industri mikro dengan pekerja sebanyak 1-4 orang, industri kecil dengan 5-19 pekerja, serta industri menengah yang memiliki 20-99 orang pekerja.⁵⁰⁴

⁵⁰³ Tulus Rambunan, Recent Development..., *op.cit*, h. 1. Lihat pula Ernie Trisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama; (Jakarta: Prenada Media, 2005), 412; serta Muhammad, *Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah: Pergulatan Melawan Kemiskinan dan Penetrasi Ekonomi Global*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama; (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), h. 32 – 33.

⁵⁰⁴ Tulus Tambunan, SME Development in Indonesia: Do Economic Growth and Government Support Matter? *Social Science Research Network_ SSRN-id1218922*, 2007, p.2. Lihat pula Ernie Trisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah, *op.cit*, 412-413, lihat pula Tulus Tambunan, *Recent Development ...*, *op.cit*, 1.

Usaha kecil mikro telah berkembang sejak lama di Indonesia dan menjadi pelaku utama dalam kegiatan ekonomi secara domestik. Hal ini terutama karena usaha kecil mikro dan menengah diakui telah menjadi penyedia terbesar kesempatan kerja bagi penduduk Indonesia. Dengan demikian, sektor usaha ini menjadi sumber utama pendapatan alternatif selain sektor pertanian bagi banyak rumah tangga di Indonesia. Selain itu, sektor ini menjadi motor penggerak penting dalam pengembangan ekonomi lokal dan komunitas masyarakat.

Usaha kecil mikro dan menengah ini semakin menjadi sektor penting di Indonesia terutama karena memiliki beberapa karakteristik.⁵⁰⁵ Karakteristik pertama adalah usaha ini dimiliki oleh pribumi dan dengan lebih dari 90 persen dari total perusahaan yang ada di Indonesia. Karakteristik ini menjadikannya sebagai sumber terbesar lapangan pekerjaan yang menyediakan kehidupan bagi lebih dari 90 persen tenaga kerja Indonesia. Kedua, usaha ini tersebar di seluruh pelosok pedesaan dan terutama usaha berlatar belakang kegiatan pertanian. Jadi, usaha mikro kecil menengah ini menjadi motor penggerak pengembangan ekonomi pedesaan.

Ketiga, usaha ini adalah industri padat karya (*labor intensive*) terutama kaum wanita dan tenaga muda yang kurang berpendidikan. Keempat, sebagian besar dari sektor usaha ini, terutama usaha kecil mikro, pembiayaannya berasal dari dana pribadi pemilik usaha. Kelima, usaha ini tidak tergantung pada barang impor dan terutama memproduksi barang konsumsi yang sederhana untuk pasar domestik dengan pangsa pasar konsumen berpendapatan rendah. Karakteristik terakhir usaha kecil mikro dan menengah di Indonesia yang membuatnya berbeda dengan UKM di negara maju adalah baik pemilik maupun karyawannya memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Hal ini dibuktikan oleh hasil penelitian Tulus Tambunan yang menemukan bahwa banyak masyarakat mendirikan usaha, terutama usaha kecil mikro lebih didorong oleh motivasi mengentaskan kemiskinan dibanding karena dorongan jiwa kewirausahaan.⁵⁰⁶

Biro Pusat Statistik (BPS) melakukan survei terhadap usaha di bidang industri manufaktur, dimana jenis usaha dikelompokkan menjadi dua yaitu usaha mikro dengan 1 – 4 pekerja, dan usaha kecil dengan 5 – 19 pekerja. Hasil survei membuktikan bahwa permasalahan utama yang dihadapi mayoritas usaha kecil mikro ini adalah kuangnya permodalan. Berbagai macam skema pemberian kredit yang diprogramkan pemerintah, tetapi tidak menjangkau mayoritas usaha kecil terutama usaha mikro yang berada di pedesaan dan daerah terpencil. Pendanaan operasional usaha dan pengembangannya tergantung pada dana tabungan pribadi pemilik, dari keluarga dan pinjaman dari masyarakat yang memiliki dana lebih.

⁵⁰⁵ Tulus Tambunan, SMEs Development..., *op.cit*, 2 – 5.

⁵⁰⁶ Tambunan, *ibid.*, 4.

BMT merupakan salah satu bentuk respon pemerintah dalam menjawab kebutuhan masyarakat terhadap pembiayaan mikro yang menawarkan produk dan jasa keuangan yang inovatif. Dimensi dari pembiayaan mikro adalah untuk menjawab realitas bahwa nasabah yang miskin tidak hanya membutuhkan pinjaman, tetapi juga jasa tabungan, asuransi, serta pembayaran. Pembiayaan mikro memiliki metodologi pembiayaan yang unik yang dapat diakses bagi kelompok masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan dan rumah tangga berpendapatan rendah. Kedua kelompok masyarakat ini umumnya tidak terlayani oleh bank-bank komersial dan lembaga keuangan formal lainnya.⁵⁰⁷

Baitul maal wat-Tamwil yang berarti rumah dana dan rumah usaha.⁵⁰⁸ Di satu pihak, *baitul maal* dengan segala konsekuensinya adalah lembaga sosial yang tidak bertujuan mencari keuntungan. Di lain pihak, *baitul tamwil* adalah institusi bisnis yang beroperasi sesuai dengan prinsip bisnis yang efektif dan efisien. Dari dua pengertian ini, BMT menjalankan dua jenis kegiatan, yaitu sebagai *baitul maal* dan sebagai *baitul tamwil*.⁵⁰⁹ BMT sebagai *baitul maal* melakukan pengumpulan zakat, infak dan sedekah, wakaf, dan sumber dana-dana sosial lainnya dan kemudian menyalirkannya kepada golongan yang berhak sesuai dengan aturan. Namun, BMT sebagai *baitul tamwil* fokus mengembangkan usaha-usaha produktif untuk meningkatkan kegiatan usaha kecil mikro, mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi yang produktif.

Baitul Maal wat-Tamwil atau Balai-usaha Mandiri Terpadu (BMT) adalah lembaga yang didirikan dan dikembangkan atas swadaya masyarakat untuk memberdayakan ekonomi rakyat. Umumnya, pendirian ini menggunakan sumberdaya yang berasal dari masyarakat sendiri, termasuk modal pendiriannya. BMT didirikan untuk mengembangkan usaha kecil mikro melalui bantuan permodalan. Selain itu, BMT juga menghimpun dana dari masyarakat untuk menunjang kegiatan pembiayaan usaha kecil mikro ini.

Dalam perspektif hukum di Indonesia, badan hukum yang paling mungkin untuk BMT adalah berbadan hukum koperasi. Hal ini disebabkan koperasi sudah dikenal oleh masyarakat secara luas dan juga memberi status legal bagi BMT. BMT berbentuk koperasi serba usaha (KSU) atau simpan pinjam syari'ah (KSPS). Bagi BMT yang berbentuk KSU, diwajibkan untuk membentuk unit simpan pinjam syari'ah (USPS), unit yang akan menangani kegiatan usaha simpan pinjam yang terpisah dari unit usaha

⁵⁰⁷ Mohammad Iwan Nazirwan, *The World Poverty Day: How Microfinance Can Share*, 12 April 2009 <http://permodalanbmt.com/?p=81#more-81>, (10 Februari 2010).

⁵⁰⁸ Muhammad Ridwan, *Sistem dan Prosedur Pendirian Baitul maal wat-Tamwil* (BMT), Cetakan I; (Yogyakarta: Citra Media, 2006), h. 1.

⁵⁰⁹ Ridwan, *ibid.*, h. 2 – 3; lihat pula Awalil Rizki, *Optimalisasi Keunggulan BMT bagi Pengembangan Ekonomi Rakyat*, 12 April 2009 <http://permodalanbmt.com/?p=70> (14 Februari 2010); serta Hertanto Widodo, M. Asmeli Firman, Dwi Hariyadi, Rimon Domiyandra, Panduan Praktis Operasional *Baitul Maal wat-Tamwil*, Cetakan Kedua; (Bandung: Penerbit Mizan, 2000), 81 – 82.

yang lain, baik dari aspek manajemen maupun keuangan.⁵¹⁰ Operasional BMT didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi syari'ah, baik sebagai penghimpun dana maupun sebagai penyalur dana bagi usaha kecil mikro.

Operasional BMT didasarkan pada prinsip-prinsip syari'ah dan menyediakan jenis-jenis transaksi layaknya yang disediakan oleh bank-bank syari'ah yang memerlukan suatu akad. Transaksi syari'ah tersebut antara lain: *wadi'ah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *salam*, *istishna'*, *ijarah*, dan *qardh*.⁵¹¹ Secara umum, jenis kegiatan BMT adalah kegiatan penyaluran dana dan penghimpunan dana. Produk *funding* di BMT adalah produk yang ditujukan untuk memperoleh dana, untuk membiayai operasional rutin. Secara umum, produk *funding* di BMT mengimplementasikan dua prinsip yaitu prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah*.⁵¹²

Prinsip *wadi'ah* dalam produk BMT adalah produk penitipan dari anggota kepada BMT. Prinsip *wadi'ah* ini dikembangkan menjadi dua bagian yaitu: a). *Wadi'ah amanah*, b). *Wadi'ah yad dhamanah*. *Wadi'ah amanah* adalah penitipan barang atau uang, dimana BMT tidak berwenang untuk memanfaatkan barang tersebut. Pemilik menyimpan barangnya untuk tujuan keamanan dan kenyamanan, BMT mengenakan biaya penyimpanan, administrasi, dan biaya lainnya yang terkait dengan penyimpanan dan pengamanan. *Wadi'ah yad dhamanah* merupakan barang atau umumnya uang, dimana BMT memiliki kewenangan untuk mengelola dana tersebut, dan BMT memberikan kompensasi kepada penyimpan. BMT dapat menggunakan produk ini untuk menampung titipan dana zakat, infak, sedekah, serta dana sosial lainnya.

Jenis produk *funding* BMT kedua adalah *mudharabah* adalah produk bagi hasil antar pemilik dana dengan pengusaha, yang dibagi dua yaitu *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. *Mudharabah mutlaqah* adalah akad penyimpanan dari anggota kepada BMT dengan sistem bagi hasil, dimana BMT diberikan kebebasan untuk memanfaatkan dana simpanan tersebut untuk mengembangkan usaha BMT. Sedangkan *mudharabah muqayyadah* akad perjanjian antara anggota dan BMT, dimana BMT memiliki pembatasan dalam penggunaan dana penyimpan. Atas dasar kesepakatan di awal akad, dana tersebut dialokasikan hanya untuk membiayai proyek tertentu.

Jenis kegiatan kedua yang dilakukan oleh BMT yaitu pembiayaan atau produk *financing* yang secara umum prinsipnya sama dengan prinsip pembiayaan yang berlaku di bank syari'ah. Produk pembiayaan tersebut dibagi empat prinsip: a). Bagi hasil (*profit and loss sharing* atau *revenue sharing*), b). Jual beli (*sale and purchase*), c). Sewa (*operational lease and financial lease*), d). Prinsip jasa (*fee based services*). Dari

⁵¹⁰ RIZKI, IBID; DAN RIDWAN, OP.CIT., 3.

⁵¹¹ Edy Tri Sujarwadi, *Profit Sharing Scheme for Micro Entrepreneur: An Ideas Sharing*, 22 Mei 2009, <http://permodalanbmt.com/?p=276#more-276>, (14 Februari 2010), lihat pula Ridwan, *op. cit.*, h. 38-43.

⁵¹² Ridwan, *ibid.*, h. 39 -43.

keempat prinsip tersebut, yang paling penting adalah prinsip bagi hasil. Prinsip bagi hasil ini menjadi pembeda yang jelas antara BMT dengan koperasi konvensional, karena BMT akan turut menanggung baik untung maupun rugi terhadap usaha yang didanainya. Selain itu, BMT juga menerapkan prinsip *musyarakah-partnership (project financing participation)*, dengan akad *musyarakah*, yaitu suatu akad kerjasama antara BMT dengan pihak lain dalam suatu usaha tertentu. Masing – masing pihak menyertakan modal atau tenaga, dimana keduanya akan menanggung keuntungan dan kerugian berdasarkan kesepakatan bersama. Model *musyarakah* umumnya dilaksanakan BMT untuk pembiayaan proyek dan modal ventura.⁵¹³

III. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang berbentuk survey dan bersifat eksplanatoris (*explanatory research*), bertujuan melakukan pengukuran dan membahas secara detail peranan BMT dalam pemberdayaan usaha kecil mikro di kota Makassar, dengan menganalisis variabel-variabel besarnya jumlah pembiayaan, manajemen UKM, kemudahan syarat-syarat pembiayaan, skema pengembalian/kemudahan pengembalian pembiayaan, pengawasan BMT terhadap UKM. Penelitian ini dilaksanakan dengan menerapkan rancangan ‘*ex post facto*’ (‘setelah kejadian’) yang non-eksperimental. Menurut Kerlinger, penelitian ‘*ex post facto*’ adalah penelitian empirik yang bersifat empiris dimana peneliti tidak dapat mengontrol variabel bebasnya karena peristiwa telah terjadi atau sifatnya tidak dapat dimanipulasi.⁵¹⁴

Data diperoleh dengan melakukan wawancara dan penyebaran kuisioner kepada 85 orang nasabah dari 17 BMT di kota Makassar. Pemilihan sampel dilakukan dengan *purposive sampling technique* dan metode analisisnya adalah analisis regresi berganda. Analisis ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara satu variabel dependen dengan lebih dari satu variabel independen. Variabel terikat penelitian ini adalah pemberdayaan usaha kecil mikro oleh BMT (Y). Sedangkan variabel bebasnya adalah skema pengembalian pembiayaan (X_1), besarnya jumlah pembiayaan yang diberikan (X_2), kemudahan syarat-syarat pembiayaan (X_3), manajemen usaha kecil mikro (X_4), dan pengawasan BMT terhadap usaha kecil mikro (X_5). Rumus yang digunakan adalah:⁵¹⁵

⁵¹³ Ridwan, *ibid.*

⁵¹⁴ Husain Umar, *Research Method in Finance and Banking*, Edisi Ketiga, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000), h. 78. Lihat pula Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Cetakan Kedelapan; (Bandung: Penerbit CV Alfabetia, 2005), h. 5.

⁵¹⁵ Tiro, *ibid*, h. 301.

$$Y = B_0 + B_1X_1 + B_2X_2 + B_3X_3 + B_4X_4 + B_5X_5 + E$$

DIMANA:

Y	= PERANAN BMT TERHADAP PEMBERDAYAAN USAHA KECIL MIKRO
X_1	= SKEMA PENGEMBALIAN PEMBIAYAAN
X_2	= JUMLAH PEMBIAYAAN
X_3	= KEMUDAHAN SYARAT-SYARAT PEMBIAYAAN
X_4	= MANAJEMEN USAHA KECIL MIKRO
X_5	= PENGAWASAN BMT TERHADAP USAHA KECIL MIKRO
B_0	= KONSTANTA (<i>INTERCEPT</i>)
B_1, B_2, B_3, B_4, B_5	= KOEFISIEN REGRESI
E	= <i>ERROR TERM</i>

Selain itu, juga digunakan uji koefisien determinasi (R^2), uji F dan uji-t.⁵¹⁶ Uji koefisien determinasi (R^2) untuk melihat semakin tepat model regresi yang digunakan sebagai alat peramalan. Uji F (analisis varians) digunakan untuk mengetahui pengaruh secara simultan koefisien regresi variabel bebas terhadap variabel terikat. Pengujian secara parsial (uji t) perlu pula dilakukan untuk mencari variabel yang paling dominan pengaruhnya terhadap peran BMT dalam pemberdayaan usaha kecil mikro, dengan tingkat signifikansi (α) = 5%.⁵¹⁷ Masing-masing hasil uji-F dan uji-t yang diperoleh dengan program SPSS versi 16.0 dibandingkan dengan nilai tabel F dan t. Jika nilai F_{hitung} lebih besar daripada nilai F_{tabel} maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan semua variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Demikian pula dengan uji t, jika nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} maka hal ini menunjukkan bahwa secara parsial, semua variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

Uji validitas dan reliabilitas dilakukan terhadap pertanyaan-pertanyaan penelitian yang diajukan kepada responden. Uji validitas bertujuan mengukur tingkat kevalidan suatu kuesioner,⁵¹⁸ dengan membandingkan nilai r_{hitung} dengan nilai r_{tabel} , menggunakan tabel *product moment*.⁵¹⁹ Sedangkan uji reliabilitas bertujuan untuk mengetahui tingkat reliabilitas suatu kuisioner, yaitu membandingkannya dengan nilai

⁵¹⁶ Sudjana, *Teknik Analisis Regresi dan Korelasi*, (Bandung: Penerbit Tarsito, 1992), h. 370.

⁵¹⁷ Algifari, *Analisis Regresi: Teori, Kasus, dan Solusi*, Edisi Kedua, Cetakan Pertama (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2000), h. 67.

⁵¹⁸ Dwi Priyatno, *Mandiri Belajar SPSS*, Cetakan Kedua (Yogyakarta: MediaKom, 2008), h. 16, lihat pula Danang Sunyoto, *Analisis Regresi dan Uji Hipotesis*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: MedPress, 2009), h. 72-78.

⁵¹⁹ Priyatno, *op.cit*, h. 17.

Cronbach Alpha. Sebuah variabel penelitian dikategorikan sebagai reliabel (dapat dipercaya) jika memiliki nilai *Cronbach Alpha* di atas 0,60 ($> 0,60$).⁵²⁰

IV. Pembahasan

Tabel 4.1. menunjukkan data keuangan 17 BMT yang beroperasi di kota Makassar selama tahun 2010/2011. Tabel 4.1. memperlihatkan total nilai asset BMT sebesar Rp. 24.244.896.252, nilai modal semua BMT yang diteliti Rp. 5.860.566.680, dana yang dipinjamkan ke usaha kecil mikro sebesar Rp. 15.615.742.107, dengan nasabah yang dilayani sebanyak 22.085 orang atau usaha.

Tabel 4.1. Data Keuangan BMT Tahun 2010/2011

NO	NAMA BMT	TOTAL ASSET (Rp)	MODAL (Rp)	DANA OUTSTANDING (Rp)	SIMPANAN (Rp)	ANGGOTA (ORANG)	SHU (Rp)
1	Al Amin	4,909,613,736	450,487,870	3,050,209,650	1,887,407,071	5,362	142,318,468
2	Al Hasanah	225,952,751	78,627,608	206,748,459	31,031,684	140	9,540,266
3	Al Ikhlas	757,923,817	87,629,593	573,689,267	290,294,224	889	9,009,275
4	Al Markaz Al Islami	4,241,850,502	1,024,823,411	3,138,009,703	2,059,862,375	3,878	145,304,585
5	Berkah Keluarga Sakinah	77,991,027	293,370	132,710,121	8,764,654	553	1,421,950
6	Fastabiqu l Khaerat	494,299,987	24,390,000	367,000,000	380,000,000	1,530	7,450,000
7	Hikmah	1,386,089,604	376,477,053	1,192,321,864	394,414,861	2,486	61,208,112
8	Sinar Surya	1,142,634,356	167,556,967	1,007,532,097	960,723,775	770	14,353,614
9	Sinergi Karya	943,942,295	784,796,086	209,183,930	84,146,173	521	82,436,086
10	Kube Sejahtera Unit 033	1,230,166,820	534,526,668	624,102,896	443,263,445	647	32,349,776
11	Kube Sejahtera Unit 034	919,869,542	444,563,119	639,588,739	367,950,542	783	13,480,568

⁵²⁰ Sunyoto, *op.cit.*, h. 67.

NO	NAMA BMT	TOTAL ASSET (Rp)	MODAL (Rp)	DANA OUTSTANDING (Rp)	SIMPANAN (Rp)	ANGGOTA (ORANG)	SHU (Rp)
12	Kube Sejahtera Unit 035	750,694,724	380,452,604	575,184,710	334,084,152	671	12,451,261
13	Kube Sejahtera 036	1,349,946,480	576,319,143	583,137,712	755,477,795	1,652	16,015,651
14	As Sunnah	1,629,776,909	47,300,000	1,507,448,300	23,484,154	873	58,992,750
15	Amanah Ummat	131,474,702	124,281,554	288,040,442	15,731,450	180	1,322,614
16	Al Azhar Maros	3,602,669,000	558,041,634	1,520,834,217	-	997	64,969,426
17	Al Qawwam Maros	450,000,000	200,000,000	-	-	153	35,000,000
	TOTAL	24,244,896,252	5,860,566,680	15,615,742,107	8,036,636,355	22,085	707,351,402

Sumber: PINBUK Sulsel dan BMT masing-masing

Nasabah BMT yang menjadi responden penelitian ini berjumlah 85 orang, 66% adalah wanita dan sisanya adalah pria. Rata-rata usia responden paling banyak berusia 31-40 tahun yaitu sebanyak 42%. Sedangkan latar belakang pendidikan nasabah BMT adalah sebesar 56% berlatar belakang pendidikan sekolah menengah dan tamatan SD sebesar 33%. Jenis usaha responden umumnya adalah pedagang kecil seperti penjual buah, pedagang sembilan bahan pokok (48%), pemilik toko kelontong (18%), dan usaha kuliner (14%). Modal usaha responden antara Rp. 100.000 – Rp. 500.000 sebanyak 26%, 21% responden memiliki modal Rp. 500.000 – Rp. 1.000.000, sisanya di atas Rp. 1 juta. Hal ini membuktikan bahwa usaha nasabah BMT termasuk kategori usaha kecil mikro ditinjau dari jumlah modal usaha. Penelitian ini juga membuktikan sebanyak 91% usaha responden hanya memiliki tenaga kerja 1 – 2 orang, yang juga merupakan karakteristik dari usaha kecil mikro berdasarkan jumlah tenaga kerja

Uji reliabilitas dalam penelitian ini diukur dengan cara membandingkan nilai *Cronbach Alpha* dengan nilai *Cronbach Alpha* variabel inependen penelitian. Pertanyaan-pertanyaan dari kelima variabel penelitian dikatakan reliabel jika memiliki nilai *Cronbach Alpha* $> 0,60$. Tabel 4.2 adalah rekapitulasi uji reliabilitas masing-masing variabel X_1 , X_2 , X_3 , X_4 , dan X_5 . Berdasarkan hasil uji reliabilitas dapat disimpulkan bahwa semua butir pertanyaan dari kelima variabel bebas tersebut dikategorikan valid karena nilai *Cronbach Alpha*-nya lebih besar dari 0,60.

Tabel 4.2. Rekapitulasi Uji Reliabilitas Variabel Penelitian

No	Variabel Penelitian	Cronbach Alpha Variabel	Cronbach Alpha
1	Pengembalian pembiayaan (X_1)	0,684	0,60
2	Jumlah pembiayaan (X_2)	0,632	0,60
3	Syarat-syarat pembiayaan (X_3)	0,732	0,60
4	Manajemen UKM (X_4)	0,708	0,60
5	Pengawasan BMT (X_5)	0,737	0,60

Sumber: Data diolah

Sedangkan uji validitas bertujuan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner, yaitu jika pertanyaan kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut.⁵²¹ Pengujian penentuan tingkat signifikansi validitas kuesioner penelitian ini adalah dengan membandingkan nilai r_{hitung} dengan r_{tabel} untuk *degree of freedom* (df) = $n - k$ yaitu $85 - 5 = 79$ dan dua daerah sisi pengujian dengan tingkat kepercayaan 95% atau $\alpha = 5\%$ diperoleh nilai $r_{tabel} = 0,221$. Secara keseluruhan nilai dari pertanyaan kuesioner menunjukkan bahwa $r_{hitung} > r_{tabel}$ yang berarti bahwa korelasi butir pertanyaan-pertanyaan untuk semua variabel bebas adalah valid.

a. Analisis Statistik

Penelitian ini menggunakan satu variabel terikat (*dependent variable*) yaitu pemberdayaan usaha kecil mikro oleh BMT (Y) dan lima variabel bebas (*independent variable*) yaitu skema pengembalian pembiayaan (X_1), jumlah pembiayaan yang diberikan (X_2), kemudahan syarat-syarat pembiayaan (X_3), manajemen usaha kecil mikro (X_4), dan pengawasan yang dilakukan BMT terhadap UKM (X_5). Hasil analisis regresi berganda ditunjukkan dalam Tabel 4.3 berikut:

⁵²¹ Danang Sunyoto, *op.cit.*, h. 72.

Tabel 4.3. Hasil Analisis Regresi Berganda

Coefficients ^a						
Model	Unstandardized Coefficients			Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	1.078	.226		4.768	.000
	SKEMA PENGEMBALIAN	.592	.045	.819	13.216	.000
	NILAI PEMBIAYAAN	.109	.041	.160	2.636	.010
	KEMUDAHAN SYARAT PENGEMBALIAN	.409	.078	.434	5.225	.000
	MANAJEMEN USAHA UKM	-.333	.086	-.350	-3.854	.000
	PENGAWASAN TERHADAP UKM	.012	.039	.017	.294	.769

a. Dependent Variable: PEMBERDAYAAN UKM

Sumber: Data diolah

Persamaan regresi berganda yang diperoleh dari tabel di atas:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \varepsilon$$

$$Y = 1,078 + 0,592 X_1 + 0,109 X_2 + 0,409 X_3 - 0,333 X_4 + 0,012 X_5 + e$$

Tabel 4.4 berikut menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi (R^2) adalah sebesar 0,810 yang berarti bahwa variasi variabel independen mampu menjelaskan fluktuasi variabel dependen sebesar 81% sisanya sebesar 19% dijelaskan oleh perubahan variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian. Tabel tersebut juga menunjukkan nilai koefisien korelasi $R = 0,900$. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang sangat kuat antara skema pengembalian pembiayaan (X_1), jumlah pembiayaan yang diberikan (X_2), kemudahan syarat-syarat pembiayaan (X_3), manajemen usaha kecil mikro (X_4), dan pengawasan yang dilakukan BMT terhadap UKM (X_5) terhadap variabel pemberdayaan UKM oleh BMT (Y).

Nilai ini berada pada rentang nilai 0,800 – 1,000 yang berarti hubungan antara variabel independen dan dependen sangat kuat.⁵²²

⁵²² Dwi Priyatno, *op.cit.*, h. 78. Lihat pula Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Cetakan Kedelapan; (Bandung: Penerbit CV. Alfabeta, 2005), h. 87.

Tabel 4.4. Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary^b

Mode	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.900 ^a	.810	.798	.19566

a. Predictors: (Constant), PENGAWASAN TERHADAP UKM, KEMUDAHAN SYARAT PENGEMBALIAN, SKEMA PENGEMBALIAN, NILAI PEMBIAYAAN, MANAJEMEN USAHA UKM

b. Dependent Variable: PEMBERDAYAAN UKM

Sumber: Data diolah

Tabel 4.5. menunjukkan bahwa variabel independen (X_1 , X_2 , X_3 , X_4 , dan X_5) secara bersama-sama/simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y), berarti hubungan yang terjadi dapat diberlakukan secara umum untuk populasi (digeneralisasikan). Nilai F_{hitung} berdasarkan hasil perhitungan SPSS yaitu sebesar 67,404. Dengan menggunakan tingkat kepercayaan 95% dan $\alpha = 5\%$, dengan *degree of freedom* (df) atau derajat kebebasan $df_1 = n - 1 = 6 - 1 = 5$ dan $df_2 = n - k - 1 = 85 - 5 - 1 = 79$, (dimana k = jumlah variabel dan n = jumlah sampel); diperoleh $F_{tabel} = 2,33021$. Tabel tersebut menunjukkan nilai $F_{hitung} > F_{tabel} = 67,404 > 2,33021$, berarti secara simultan ada pengaruh signifikan dari variabel X_1, X_2, X_3, X_4 dan X_5 terhadap variabel terikat (Y).

Tabel 4.5. Uji F

ANOVA^b

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	12.902	5	2.580	67.404
	Residual	3.024	79	.038	
	Total	15.927	84		

a. Predictors: (Constant), PENGAWASAN TERHADAP UKM, KEMUDAHAN SYARAT PENGEMBALIAN, SKEMA PENGEMBALIAN, NILAI PEMBIAYAAN, MANAJEMEN USAHA UKM

b. Dependent Variable: PEMBERDAYAAN UKM

Sumber: Data diolah

Tabel 4.6 merangkum pengaruh parsial dari semua variabel independen: X_1 , X_2 , X_3 , X_4 , dan X_5 terhadap variabel dependen Y. Dengan menggunakan tingkat kepercayaan 95% dan $\alpha = 5\% : 2 = 2,5\%$ (2-tailed), dengan *degree of freedom* (df) atau derajat kebebasan $= n - k - 1 = 85 - 5 - 1 = 79$, diperoleh nilai t_{tabel} untuk masing-masing variabel independen. Berdasarkan Tabel 4.6, variabel (X_1), jumlah pembiayaan yang diberikan (X_2), dan kemudahan syarat-syarat pembiayaan (X_3), secara parsial memiliki pengaruh

signifikan terhadap variabel pemberdayaan UKM oleh BMT (Y). Sedangkan variabel manajemen usaha kecil mikro (X_4), dan pengawasan yang dilakukan BMT terhadap UKM (X_5) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel pemberdayaan UKM oleh BMT (Y).

Tabel 4.6. Rekapitulasi Hasil Uji – t

No	Variabel Penelitian	t _{hitung}	t _{tabel}	Kesimpulan
1	Pengembalian pembiayaan (X_1)	13,216	1,99045	Ditolak
2	Jumlah pembiayaan (X_2)	2,636	1,99045	Ditolak
3	Syarat-syarat pembiayaan (X_3)	5,225	1,99045	Ditolak
4	Manajemen UKM (X_4)	-3,854	1,99045	Diterima
5	Pengawasan BMT (X_5)	0,294	1,99045	Diterima

Sumber: Data diolah

Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui bahwa model yang terbentuk memenuhi semua asumsi klasik, sehingga dapat disimpulkan bahwa model tersebut memiliki sifat BLUE (*Best Linier Unbiased Estimator*). Algafari⁵²³ mengemukakan bahwa model regresi yang diperoleh dari metode kuadrat terkecil biasa (*Ordinary Least Squares, OLS*) adalah model regresi yang menghasilkan *Best Linier Unbiased Estimator* (BLUE). Kondisi ini akan terjadi apabila beberapa asumsi yang disebut asumsi klasik terpenuhi, yaitu non-multikolinearitas, homokedastisitas dan non-autokorelasi.

1. Uji Multikolinearitas

Penyimpangan asumsi model klasik yang pertama adalah adanya multikolinearitas dalam model regresi yang dihasilkan. Artinya antar variabel bebas dalam model memiliki hubungan yang sempurna atau mendekati sempurna yang ditandai oleh tingginya koefisien korelasi yang mendekati 1 atau bahkan sama dengan 1.

Konsekuensi model regresi yang mengandung multikolinearitas adalah kesalahan standar estimasi akan cenderung meningkat dengan meningkatnya variabel bebas, tingkat signifikansi yang digunakan untuk menolak hipotesis nol akan semakin besar dan probabilitas untuk menerima hipotesis yang salah (kesalahan β) juga akan semakin besar. Akibatnya, model regresi yang diperoleh tidak valid untuk menaksir nilai variabel bebas. Menurut Gujarati⁵²⁴, diagnosis secara sederhana terhadap adanya multikolinearitas dalam model regresi adalah dengan melihat nilai *tolerance* dan

⁵²³ Al Ghifari, *op.cit.*, h. 83

⁵²⁴ D.N. Gujarati, *Basic Econometrics*, Alihbahasa Sumarno Zain, Cetakan Keenam, (Jakarta: PT Erlangga, 1999), h. 335. ; lihat pula Danang Sunyoto, *op.cit.*, h. 79.

variance inflating factor (VIF). Suatu variabel yang memiliki kolinearitas yang tinggi akan memiliki *tolerance* mendekati 0 atau memiliki tingkat VIF lebih dari 10. Tetapi menurut Santoso⁵²⁵, secara umum, apabila VIF lebih besar dari 5, maka variabel tersebut memiliki persoalan multikolinearitas dengan variabel bebas lainnya.

Tabel 4.7. menunjukkan hasil uji multikolinearitas, seperti di bawah ini:

Tabel 4.7. Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	SKEMA PENGEMBALIAN	.626	1.597
	NILAI PEMBIAYAAN	.651	1.537
	KEMUDAHAN SYARAT PENGEMBALIAN	.348	2.872
	MANAJEMEN USAHA UKM	.292	3.424
	PENGAWASAN TERHADAP UKM	.733	1.364

a. Dependent Variable: PEMBERDAYAAN UKM

Sumber: Data diolah

Dengan $tolerance/\alpha = 0,05$ maka Variance Inflation Factor (VIF) = 5; dari Tabel 4.7. di atas nilai VIF semua variabel independen < 5, dan nilai tolerance semua variabel bebas > 5%, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas antar variabel.

2. Uji Heterokedastisitas

Penyimpangan kedua dari asumsi model klasik adalah adanya heterokedastisitas, yaitu variabel dalam model tidak sama. Konsekuensi adanya heterokedastisitas dalam model regresi adalah penaksir/ estimator yang diperoleh tidak efisien, baik dalam sampel yang kecil maupun sampel yang besar, meskipun estimator yang diperoleh menggambarkan populasinya (tidak bias) dan bertambahnya sampel yang digunakan akan mendekati nilai sebenarnya (konsisten). Hal ini disebabkan oleh varians yang tidak minimum (tidak efisien). Adanya heterokedastisitas dalam model dapat didiagnosis dengan melihat ada tidaknya pola tertentu dalam *scatterplot*. Dasar pengambilan keputusan dengan menggunakan metode grafik ini adalah:⁵²⁶

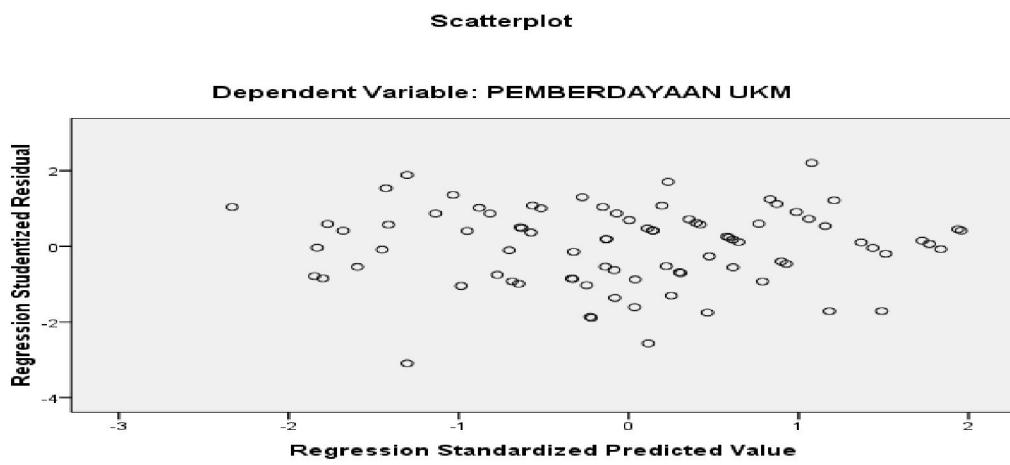
⁵²⁵ Singgih Santoso, *SPSS (Statistical Product and Service Solutions)*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo- Kelompok Gramedia, 1999), h. 357.

⁵²⁶ *Ibid*, h. 210.

- a. Jika terdapat pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka terdapat heterokedastisitas.
 - b. Jika terdapat pola yang jelas, serta titik-titik yang menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas.

Gambar 4.1. di bawah menunjukkan titik-titik menyebar di bawah dan di atas sumbu Y, dan tidak memiliki pola yang teratur. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas antar variabel bebas penelitian ini.Uji heterokedasatisitas penelitian ini ditunjukkan dalam gambar berikut:

Gambar 4.1. Scatter Plot untuk Uji Heterokedastisitas



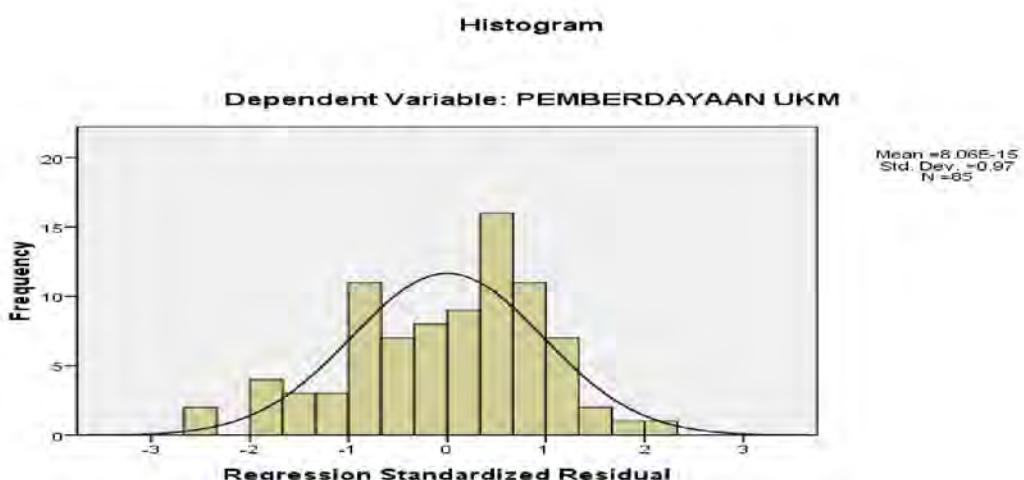
Sumber: Data diolah

3. Uji Normalitas

Uji ini digunakan untuk mendeteksi data variabel independen (X) dan dependen (Y) terdistribusi normal atau tidak. Persamaan regresi yang baik akan memiliki data variabel bebas dan data variabel terikat berdistribusi mendekati normal atau normal sama sekali.⁵²⁷ Uji normalitas pada penelitian ini ditunjukkan pada Gambar 4.2 berikut:

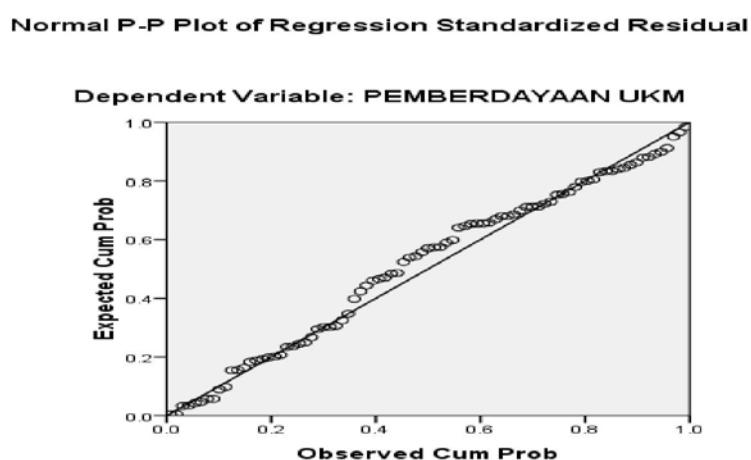
⁵²⁷ Danang Sunyoto, *op.cit.*, h. 84.

Gambar 4.2. Histogram untuk Uji Normalitas



Sumber: Data diolah

Gambar 4.3. Normal Probability Plots



Sumber: Data diolah

Dari gambar histogram dan *normal probability plots* di atas dapat disimpulkan bahwa data variabel independen dan dependen dalam penelitian ini terdistribusi normal, karena bentuk lonceng (*bell-shape*) pada histogram dan titik-titik mengikuti garis diagonal pada gambar *normal probability plots*.

4. Uji Autokorelasi

Penyimpangan terakhir adalah adanya autokorelasi dalam model regresi, yaitu adanya korelasi antara anggota sampel yang diurut berdasarkan waktu. Penyimpangan ini umumnya terjadi pada observasi yang menggunakan *time series data*. Konsekuensi adanya suatu autokorelasi dalam model regresi adalah varians sampel tidak dapat menggambarkan varian populasinya sehingga model regresi yang dihasilkan tidak dapat digunakan untuk menaksir nilai variabel terikat pada nilai variabel bebas tertentu. Untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi dalam suatu model regresi dapat dilakukan melalui pengujian nilai uji Durbin Watson (uji DW) dimana nilai uji DW dibandingkan dengan nilai tabel uji DW.⁵²⁸ Berikut ini adalah kriteria untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi dalam model regresi:

- a. Jika nilai DW > -2 = terdapat autokorelasi positif
 - b. Jika $-2 < DW < 2$ = tidak ada autokorelasi
 - c. Jika nilai DW > +2 = terdapat autokorelasi negatif

Hasil uji Durbin-Watson ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 4.8. Hasil Uji Durbin-Watson untuk Autokorelasi

Model Summary^b

Mode	Durbin-Watson
1	1.589*

- a. Predictors: (Constant), PENGAWASAN TERHADAP UKM, KEMUDAHAN SYARAT PENGEMBALIAN, SKEMA PENGEMBALIAN, NILAI PEMBIAYAAN, MANAJEMEN USAHA UKM

b. Dependent Variable: PEMBERDAYAAN UKM

Sumber: Data diolah

Tabel di atas menunjukkan nilai DW berada antara nilai +2 dan -2, berarti tidak terjadi autokorelasi pada data penelitian.

b. Analisis Deskriptif

BMT memiliki potensi untuk lebih berkembang di masa yang akan datang, seiring dengan makin meningkatnya kesadaran masyarakat Indonesia untuk memanfaatkan lembaga keuangan yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam

⁵²⁸ Gujarati, *op.cit.*, h. 217; lihat pula Danang Sunyoto, *op.cit.*, h. 92.

bisnisnya. Hal ini ditunjukkan dengan Total aset BMT yang mencapai Rp. 5 Trilyun pada akhir tahun 2010, dengan jumlah nasabah yang dilayani mencapai 3,5 juta orang dan sekitar 60.000 orang yang bekerja di BMT. Perkembangan jumlah BMT di seluruh Indonesia juga menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan. Berdasarkan data PINBUK per 2001 total jumlah BMT yang terdaftar adalah 2.938 BMT dengan 1.828 BMT yang melaporkan kegiatannya secara berkala pada PINBUK.⁵²⁹

Perkembangan ini perlu direspon positif oleh semua pihak terutama dukungan regulasi yang memadai dari pemerintah. Dari penelitian ini juga terungkap rendahnya mutu berbagai faktor yang dimiliki oleh BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah untuk bisa maju dan berkontribusi besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Aspek kualitas SDM pengelola BMT, seperti rendahnya pengetahuan pengelola tentang prinsip-prinsip syariah dalam ekonomi, menjadi salah satu kendala dalam mengembangkan BMT. Selain itu, kemampuan manajerial dalam pengelolaan BMT, seperti manajemen keuangan, operasional, pemasaran, dan keahlian di bidang akuntansi juga menjadi faktor yang perlu mendapat perhatian serius, karena berdampak pada hubungan BMT dengan bank-bank syariah sebagai salah satu penyedia dana bagi nasabah BMT, terutama terkait dengan penyusunan laporan keuangan BMT. Hal ini berpengaruh terhadap besarnya dana pembiayaan yang disalurkan bank-bank syariah ke BMT yang kemudian menyalirkannya ke nasabah. Akibatnya akumulasi kebutuhan dana masyarakat untuk membiayai usahanya kadangkala tidak dapat dipenuhi oleh BMT. Hal ini kemudian menimbulkan masalah baru yaitu masih banyak usaha kecil mikro ini memeroleh dana untuk modal usaha dari rentenir.

V. Penutup

Lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT dalam memberdayakan usaha kecil mikro di Makassar perlu terus didukung oleh pemerintah dalam bentuk regulasi yang berpihak pada pengembangan BMT di masa depan. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa BMT secara signifikan berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian modal kepada usaha kecil mikro yang tidak terlayani lembaga perbankan. Dukungan pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM serta pihak lain, seperti perbankan syariah, dan lain-lain, terutama dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas manajemen BMT sehingga layanan yang diberikan kepada nasabahnya dapat ditingkatkan.

⁵²⁹ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, Edisi 3, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Penerbit Ekonosia, 2008), h. 106.

DAFTAR PUSTAKA

- Abor, Joshua., Biekpe, Nicholas, Corporate Governance, Ownership Structure, and Performance of SMEs in Ghana: Implications for Financing Opportunities, *Journal of Corporate Governance*, Vol. 7 No. 3, 2007, pp. 288 – 300.

Algifari, *Analisis Regresi: Teori, Kasus, dan Solusi*, Edisi Kedua, Cetakan Pertama; Yogyakarta: BPFE- Yogyakarta, 2000.

Berry, Albert., Levy, Brian., Indonesia's Small and Medium-Size Exporters and Their Support Systems, *Policy Research Working Paper 1402*, the World Bank, Policy Research Development, Finance and Private Sector Development Division, 1994, pp. 3 – 74.

Dusuki, Asyraf Wajdi., Banking for the Poor: the Role of Islamic Banking in Microfinance Initiatives, *Humanomics*, Vol. 24 No. 1, 2008, pp. 49 – 66.

Elahi, Khandakar Q., Danopoulos, Constantine P., Microcredit and the Third World: Perspectives from Moral and Political Philosophy, *International Journal of Social Economics*, Vol. 31 No. 7, 2004, pp. 643-654.

Gujarati, D.N.. *Basic Econometrics*, Alihbahasa Sumarno Zain, Cetakan Keenam; Jakarta: PT Erlangga, 1999.

Lin, Carol Yeh-Yun and Mavis Yi-Ching Chen., Does innovation lead to performance? An empirical study of SMEs in Taiwan, *Management Research News*. Vol. 30 No. 2, 2007, pp. 115-132.

Muhammad, *Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah: Pergulatan Melawan Kemiskinan dan Penetrasi Ekonomi Global*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama; Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2009.

Muttaqien, Zaenal., *Pertumbuhan BMT Bakal Catat Rekor*, 15 Februari 2010, (<http://permodalanbmt.com/?cat=3>), diakses tanggal 26 Februari 2010.

Nazirwan, Mohamad Iwan, *The World Poverty Day, How Microfinance Can Share*, 12 April 2009 <http://permodalanbmt.com/?p=81#more-81> diakses tanggal 10 Februari 2010.

Obaidullah, Mohammed., Role of Microfinance in Poverty Alleviation: Lessons from Experiences Selected IDB Member Countries, *Islamic Research and Training Institute, Member of Islamic Development Bank Group*, 2008, pp. 1 – 92.

Okello-Obura, Constant., M.K. Minishi-Majanja and Linda Cloete., J.R. Ikoja-Odongo., Business Activities and Information Needs of SMEs in Northern Uganda:

Prerequisites for an Information System, *Business activities of SMEs*), Vol. 29 No. 4/5, 2008, pp. 367-391.

Perdana, Ari., Friawan., Deni, Economic Crisis, Institutional Changes, and the Effectiveness of Government: the Case of Indonesia, *CSIS WORKING PAPER SERIES*, *Economics Working Paper Series*, June 2007, p. 4, <http://www.csis.or.id/papers/wpi102>, diakses tanggal 10 Februari 2010.

Priyatno, Dwi, *Mandiri Belajar SPSS*, Cetakan Kedua, Yogyakarta: MediaKom, 2008.

Ridwan, Muhammad., *Sistem dan Prosedur Pendirian Baitul Mal wat-Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: Penerbit Citra Media, 2006.

RIZKI, AWALIL., OPTIMALISASI KEUNGGULAN BMT BAGI PENGEMBANGAN EKONOMI RAKYAT, 12 APRIL 2009, [HTTP://PERMODALANBMT.COM/?P=70](http://PERMODALANBMT.COM/?P=70) DIAKSES TANGGAL 14 FEBRUARI 2010.

Santoso, Singgih., *SPSS (Statistical Product and Service Solutions)*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo- Kelompok Gramedia, 1999.

Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, Edisi 3, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Penerbit Ekonosia, 2008.

Sudjana, *Teknik Analisis Regresi dan Korelasi*, Bandung: Penerbit Tarsito, 1992.

Sugiyono, *Statistik untuk Penelitian*, Cetakan Kedelapan; Bandung: Penerbit CV. Alfabeta, 2005.

Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Cetaka Kedelapan; Bandung: Penerbit CV. Alfabeta, 2005.

Sujarwadi, Edy Tri,. *Profit Sharing Scheme for Micro Entrepreneur: An Ideas Sharing*,
22 Mei 2009, <http://permodalanbmt.com/?p=276#more-276>, diakses tanggal 14
Februari 2010.

Sule, Ernie Trisnawati dan Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama; Jakarta: Prenada Media, 2005.

Sunyoto, Danang, *Analisis Regresi dan Uji Hipotesis*, Cetakan Pertama; Yogyakarta: MedPress, 2009.

Tambunan, Tulus., SME Development in Indonesia: Do Economic Growth and Government Support Matter? *Social Science Research Network_ SSRN-id1218922*, 2007, pp. 1 – 19.

Tambunan, Tulus, *Entrepreneurship Development in Indonesia*, Kadin Indonesia – Jetro, 2006 <http://www.kadin-indonesia.or.id/enm/images/dokumen/KADIN-98-2309-21112007.pdf>. diakses tanggal 26 Februari 2010.

Tambunan, Tulus, *Recent Development of Women's Enterprises in Indonesia*, Kadin Indonesia, 2007, http://www.kadin-indonesia.or.id/enm/images/dokumen/KADIN-98-2309-21112007-rec-dev-women-enterprise_TULUS, diakses tanggal 26 Februari 2010.

Temtime, Zelealem T., Chinyoka., S.V., and J.P.W., A Decision Tree Approach For Integrating Small Business Assistance Schemes, *Journal of Management Development*, Vol. 23 No. 6, 2004, pp. 563-578.

Tiro, Muhammad Arif., *Dasar-dasar Statistika*, Edisi Revisi; Makassar: Makassar State University Press, 2000.

Umar, Husein., *Research Methods in Finance and Banking*, Edisi Ketiga; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000.

Widodo, Hertanto., Firman M. Asmeldi., Dwi Hariyadi, Rimon Domiyandra, *Panduan Praktis Operasional Baitul Mal wat-Tamwil (BMT)*, Cetakan Kedua; Bandung: Penerbit Mizan, 2000.

<http://permodalanbmt.com>